Artikel Penelitian

**Economy Deposit Journal (E-DJ)**
Volume 8 Nomor 2, September 2026
P-ISSN: 2685-080X, E-ISSN: 2685-0915
DOI: 10.36090

# IMPLEMENTASI INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS) PADA PELAPORAN KEUANGAN UMKM DI KOTA MAKASSAR DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL

**Yoghie Syahrial[1], Irmah Halimah Bachtiar[2], Ibadurrahman[3], Abdul Hafid[4]**

Universitas Indonesia Timur[1,2,3,4]

Email : yoghieesyahriall@gmail.com, irmahalimah@gmail.com, Ibadurrahman1990@gmail.com, abdulhafidasad@gmail.com

Corresponding author: yoghieesyahriall@gmail.com

***ABSTRACT***

*This study examines the implementation of International Financial Reporting Standards (IFRS), as adopted through SAK EMKM and SAK EP, in the financial reporting practices of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Makassar City amid intensifying global competition, and evaluates the determinants and competitive implications of that implementation.*

*A sequential explanatory mixed-methods design was used, combining a structured survey of 387 valid MSME respondents selected through stratified random sampling with semi-structured interviews of 24 purposively selected informants, analyzed through multiple regression and six-step thematic analysis.*

*The average IFRS implementation index reached only 34.2 out of 100. Human resource competence (β = 0.341), perceived benefit (β = 0.287), and institutional support (β = 0.198) each significantly predicted implementation, which in turn significantly predicted MSME competitiveness (β = 0.412), particularly through formal financing access and international business network participation.*

*Closing the IFRS implementation gap requires a coordinated ecosystem approach involving local government, accounting professional associations, financial institutions, and universities, rather than fragmented, one-off training interventions.*

***Keywords.*** *IFRS, SAK EMKM, SAK EP, MSME, Makassar City, Financial Reporting, Global Competitiveness*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji implementasi International Financial Reporting Standards (IFRS), yang diadopsi melalui SAK EMKM dan SAK EP, pada praktik pelaporan keuangan UMKM di Kota Makassar di tengah persaingan global yang semakin intensif, serta mengevaluasi faktor determinan dan implikasinya terhadap daya saing.

Penelitian menggunakan desain campuran sequential explanatory, menggabungkan survei terhadap 387 responden UMKM yang valid melalui stratified random sampling dengan wawancara semi-terstruktur terhadap 24 informan purposive, dianalisis melalui regresi berganda dan analisis tematik enam tahap.

Rata-rata indeks implementasi IFRS hanya 34,2 dari skala 100. Kompetensi SDM (β = 0,341), persepsi manfaat (β = 0,287), dan dukungan institusional (β = 0,198) masing-masing berpengaruh signifikan terhadap implementasi, yang selanjutnya berpengaruh signifikan terhadap daya saing UMKM (β = 0,412), terutama melalui akses pembiayaan formal dan keterlibatan jaringan bisnis internasional.

Menutup kesenjangan implementasi IFRS memerlukan pendekatan ekosistem yang terkoordinasi antara pemerintah daerah, asosiasi profesi akuntansi, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi, alih-alih intervensi pelatihan yang terfragmentasi dan bersifat satu kali.

**Kata Kunci.** IFRS, SAK EMKM, SAK EP, UMKM, Kota Makassar, Pelaporan Keuangan, Daya Saing Global

Artikel Penelitian

Economy Deposit Journal (E-DJ)
Volume 8 Nomor 2, September 2026
P-ISSN: 2685-080X, E-ISSN: 2685-0915
DOI: 10.36090

## PENDAHULUAN

Perekonomian global pada dasawarsa kedua abad ke-21 mengalami transformasi yang tidak hanya dipicu oleh kemajuan teknologi digital, melainkan juga oleh pergeseran fundamental dalam tata kelola informasi keuangan lintas batas. Arus modal internasional yang kian deras, maraknya platform perdagangan elektronik, serta ekspansi investasi asing langsung ke negara berkembang telah menciptakan ekosistem bisnis yang menuntut transparansi dan komparabilitas laporan keuangan dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Di tengah dinamika inilah, International Financial Reporting Standards (IFRS) muncul bukan sekadar sebagai instrumen teknis akuntansi, melainkan sebagai bahasa universal keuangan yang menjadi prasyarat partisipasi aktif dalam rantai nilai global.

Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kepentingan strategis yang besar dalam adopsi standar pelaporan keuangan internasional. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan peta jalan konvergensi IFRS sejak tahun 2008 dan secara bertahap mengharmonisasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan kerangka IFRS. Namun demikian, implementasi yang sesungguhnya masih menghadapi kesenjangan yang cukup lebar, terutama pada segmen pelaku usaha yang justru menjadi tulang punggung perekonomian nasional, yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa per tahun 2022, terdapat lebih dari 65,4 juta unit UMKM yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 61,07 persen terhadap Produk Domestik Bruto (Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, 2022). Paradoks yang kemudian muncul adalah: entitas yang paling vital bagi perekonomian justru merupakan yang paling rentan terhadap tekanan persaingan global akibat keterbatasan kapasitas manajerial dan keuangan, termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan yang terstandarisasi.

Kota Makassar, sebagai episentrum ekonomi Kawasan Timur Indonesia, menyajikan konteks yang sangat relevan untuk diteliti. Makassar adalah simpul logistik, pusat perdagangan antarpulau, dan pintu gerbang ekspor komoditas unggulan dari wilayah timur Indonesia seperti kakao, rumput laut, nikel olahan, dan udang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Makassar mencatat bahwa hingga akhir 2023, terdapat lebih dari 35.000 unit UMKM aktif yang bergerak di berbagai sektor (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Makassar, 2023). Dengan penetrasi internet yang terus meningkat, UMKM Makassar secara de facto telah memasuki arena persaingan global meskipun belum sepenuhnya siap secara kelembagaan dan administratif.

Ketidaksiapan tersebut paling nyata tercermin dalam praktik pelaporan keuangan. Sebagian besar UMKM di Makassar masih mengandalkan pencatatan keuangan yang bersifat kasual dan tidak konsisten, seringkali hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran harian tanpa memisahkan aset bisnis dari aset pribadi, tanpa menghitung depresiasi aset tetap, dan tanpa menyusun laporan posisi keuangan yang komprehensif. Kondisi ini bukan semata-mata persoalan rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM, melainkan juga mencerminkan absennya standar yang operasional dan terjangkau untuk diterapkan oleh entitas berskala kecil.

Respons terhadap kebutuhan ini telah hadir dalam bentuk IFRS for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs) yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) dan diperbarui secara komprehensif pada tahun 2022 untuk lebih menyelaraskan ketentuannya dengan Full IFRS terbaru (IASB, 2022). Di Indonesia, standar ini diadopsi melalui SAK EMKM yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2018, dan kemudian diperbarui dengan SAK EP yang mengakomodasi entitas privat dengan transaksi yang lebih kompleks (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). Namun, kehadiran standar tersebut di atas kertas belum secara otomatis berimplikasi pada adopsi yang luas di lapangan.

Penelitian terdahulu mengenai implementasi IFRS pada UMKM di berbagai wilayah Indonesia mengungkap pola yang konsisten: terdapat gap yang signifikan antara kerangka normatif yang telah ditetapkan dengan praktik aktual di lapangan. Firdaus dan Wasilah (2020) menemukan bahwa tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM di Pulau Jawa masih sangat terbatas, dengan hanya 23 persen responden yang pernah mendengar istilah tersebut. Penelitian serupa oleh Nurlaela dkk. (2021) di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa hambatan terbesar

Artikel Penelitian

Economy Deposit Journal (E-DJ)
Volume 8 Nomor 2, September 2026
P-ISSN: 2685-080X, E-ISSN: 2685-0915
DOI: 10.36090

implementasi standar akuntansi bagi UMKM bukan hanya kompetensi, melainkan juga persepsi tentang relevansi standar tersebut terhadap kebutuhan bisnis mereka sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian empiris yang spesifik mengenai implementasi IFRS (dalam konteks SAK EMKM dan SAK EP) pada UMKM di Kota Makassar, dengan tujuan menganalisis tingkat implementasinya, mengidentifikasi faktor-faktor determinannya, serta mengevaluasi implikasinya terhadap daya saing UMKM dalam arena persaingan global. Penelitian ini dibatasi pada UMKM sektor perdagangan, manufaktur skala kecil, dan jasa yang terdaftar dan aktif di Kota Makassar, dengan periode penelitian tahun fiskal 2021 hingga 2023.

## KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

### Kerangka Konseptual IFRS dan Adopsinya di Indonesia

International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan seperangkat standar akuntansi internasional yang dikeluarkan oleh IASB dengan tujuan menyediakan bahasa pelaporan keuangan yang seragam dan dapat dibandingkan di seluruh dunia. Perkembangan IFRS tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pasar modal global yang semakin terintegrasi, di mana investor institusional dan korporasi multinasional membutuhkan informasi keuangan yang konsisten lintas yurisdiksi (Nobes & Parker, 2020). Hingga saat ini, lebih dari 140 yurisdiksi di seluruh dunia telah mengadopsi atau mengizinkan penggunaan IFRS (IFRS Foundation, 2023).

Kerangka IFRS mencakup dua jalur utama: Full IFRS bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik, dan IFRS for SMEs sebagai adaptasi lebih sederhana bagi entitas tanpa akuntabilitas publik, dengan pembaruan komprehensif terakhir pada tahun 2022 yang menghilangkan topik-topik yang tidak relevan bagi entitas menengah ke bawah (IASB, 2022). Di Indonesia, peta jalan konvergensi IAI sejak 2008 menghasilkan tiga pilar standar: PSAK berbasis Full IFRS, SAK EP sebagai adopsi IFRS for SMEs untuk entitas privat, dan SAK EMKM yang dirancang khusus bagi kebutuhan UMKM (Ikatan Akuntan Indonesia, 2024).

SAK EMKM yang efektif sejak 1 Januari 2018 merupakan terobosan signifikan dalam demokratisasi standar akuntansi di Indonesia, dengan laporan keuangan yang disyaratkan hanya terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. SAK EP, yang menggantikan SAK ETAP dan berlaku efektif 1 Januari 2025, merupakan adopsi yang lebih komprehensif dari IFRS for SMEs dan ditujukan bagi entitas privat dengan transaksi yang lebih kompleks. Prasetyo dan Kusuma (2022) berargumen bahwa kehadiran SAK EP memberikan jembatan yang lebih mulus bagi UMKM yang sedang dalam proses scale-up untuk bertransisi ke standar yang lebih diakui secara internasional.

### Tantangan Pelaporan Keuangan UMKM

Literatur tentang pelaporan keuangan UMKM secara konsisten mengidentifikasi dualisme yang membentuk realitas akuntansi entitas kecil: di satu sisi terdapat tekanan eksternal untuk mengadopsi praktik akuntansi yang lebih formal, sementara di sisi lain terdapat keterbatasan internal yang membuat adopsi tersebut menjadi beban yang tidak proporsional. Andriani dan Susanto (2021) dalam kajian terhadap usaha kecil di Indonesia menemukan bahwa produksi informasi akuntansi sangat dipengaruhi oleh ukuran usaha, usia usaha, sektor industri, dan pelatihan yang diterima pemilik.

Sari dan Purwanto (2020) mengidentifikasi empat kategori hambatan utama implementasi standar akuntansi pada UMKM di Indonesia: (1) hambatan kapasitas sumber daya manusia; (2) hambatan persepsi biaya-manfaat; (3) hambatan teknologi dan infrastruktur; dan (4) hambatan regulasi dan insentif. Musmini (2021) dalam studinya tentang UMKM di kawasan Indonesia Timur secara khusus menyoroti dimensi budaya, yaitu bahwa kepercayaan interpersonal seringkali menggantikan fungsi laporan keuangan formal dalam membangun hubungan bisnis, sehingga pelaku UMKM tidak merasakan tekanan nyata untuk memproduksi laporan keuangan formal selama jaringan kepercayaan masih berfungsi.

Namun demikian, perspektif yang menempatkan UMKM sebagai subjek pasif terhadap tekanan adopsi standar akuntansi mulai ditantang oleh penelitian terkini. Wahyudi dan Pribadi (2022) menunjukkan bahwa UMKM yang

Artikel Penelitian

Economy Deposit Journal (E-DJ)
Volume 8 Nomor 2, September 2026
P-ISSN: 2685-080X, E-ISSN: 2685-0915
DOI: 10.36090

berhasil menavigasi ekosistem bisnis digital dengan memanfaatkan platform fintech dan e-commerce cenderung secara organik mengembangkan praktik pencatatan keuangan yang lebih terstruktur, bukan semata-mata karena tekanan regulasi, tetapi karena kebutuhan operasional yang riil.

**IFRS dan Daya Saing Global UMKM**

Hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan daya saing entitas bisnis telah menjadi subjek kajian yang kaya dalam literatur ekonomi dan akuntansi. Florou, Kosi, dan Pope (2021) dalam kajian terbaru mereka tentang konsekuensi ekonomi adopsi IFRS menunjukkan bahwa adopsi standar pelaporan yang lebih ketat berkorelasi dengan penurunan biaya modal dan peningkatan aliran investasi. Meski temuan tersebut berfokus pada perusahaan publik, mekanisme yang sama, yakni peningkatan transparansi dan komparabilitas informasi keuangan, secara logis berlaku pula pada UMKM yang berinteraksi dengan ekosistem bisnis internasional.

Pada level mikro UMKM, Yoshino dan Taghizadeh-Hesary (2018) menyimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan prediktor signifikan dari keberhasilan akses UMKM terhadap pembiayaan formal di kawasan Asia. Dalam konteks rantai pasok global, Gereffi (2020) mengidentifikasi bahwa kemampuan UMKM untuk masuk dan bertahan dalam jaringan produksi global sangat bergantung pada kemampuan mereka memenuhi standar transparansi, termasuk pelaporan keuangan, yang ditetapkan oleh perusahaan inti dalam rantai pasok, terutama dalam konteks praktik ESG yang kini semakin umum disyaratkan.

Di Indonesia, Trisna dan Iswajuni (2023) secara spesifik mengkaji hubungan antara kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM dengan akses UMKM terhadap pembiayaan dari bank umum dan lembaga keuangan mikro. Mereka menemukan bahwa UMKM yang menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM memiliki probabilitas 2,7 kali lebih tinggi untuk mendapatkan persetujuan kredit dibanding UMKM dengan pencatatan keuangan informal, memperkuat argumen bahwa investasi dalam kualitas pelaporan keuangan memberikan return yang signifikan.

**Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

Penelitian ini mengintegrasikan dua kerangka teoritis. Pertama, Teori Difusi Inovasi sebagaimana diterapkan oleh Hartanto dan Widiastuti (2021) memandang adopsi standar akuntansi baru sebagai proses difusi inovasi yang dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri (keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, trialabilitas, observabilitas), karakteristik adopter, dan saluran komunikasi yang digunakan. Dalam konteks ini, SAK EMKM dan SAK EP merupakan inovasi kelembagaan yang difusinya dipengaruhi oleh persepsi pelaku UMKM tentang manfaat relatif dan kompleksitas implementasi.

Kedua, Teori Institusional sebagaimana diaplikasikan oleh Hidayat dan Lestari (2022) pada konteks adopsi standar akuntansi di negara berkembang memberikan perspektif tentang bagaimana tekanan koersif (dari regulasi), tekanan mimetik (dari perilaku kompetitor), dan tekanan normatif (dari asosiasi profesi) mendorong isomorfisme institusional dalam praktik akuntansi. Teori ini membantu menjelaskan mengapa adopsi standar akuntansi tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan rasional ekonomi, tetapi juga oleh konformitas terhadap tekanan lingkungan institusional.

Berdasarkan kajian pustaka tersebut, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut: H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat implementasi IFRS pada UMKM di Kota Makassar. H2: Persepsi manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat implementasi IFRS pada UMKM di Kota Makassar. H3: Dukungan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat implementasi IFRS pada UMKM di Kota Makassar. H4: Tingkat implementasi IFRS berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM di Kota Makassar dalam konteks persaingan global.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methods research) dengan desain sequential explanatory, yaitu pengumpulan dan analisis data kuantitatif dilakukan terlebih dahulu, diikuti pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk menjelaskan dan memperdalam hasil kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2023).

Artikel Penelitian

Economy Deposit Journal (E-DJ)
Volume 8 Nomor 2, September 2026
P-ISSN: 2685-080X, E-ISSN: 2685-0915
DOI: 10.36090

### Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar dan aktif beroperasi di Kota Makassar, yang berjumlah lebih dari 35.000 unit per akhir tahun 2023 (Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Makassar, 2023). Populasi disaring dengan kriteria inklusi: (1) bergerak di sektor perdagangan, manufaktur skala kecil, atau jasa; (2) telah beroperasi minimal dua tahun; (3) omset tahunan minimal Rp 50 juta; dan (4) memiliki minimal satu orang yang bertanggung jawab atas pencatatan keuangan.

Penentuan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 5 persen, menghasilkan ukuran sampel minimum 395 unit, dengan target sampel 450 UMKM melalui stratified random sampling berdasarkan kecamatan dan sektor usaha. Untuk komponen kualitatif, sampel dipilih secara purposive dari informan kunci tahap kuantitatif, konsultan akuntansi, pejabat dinas koperasi dan UKM, perwakilan perbankan, serta akademisi, dengan total 24 informan.

### Variabel dan Operasionalisasi

Variabel dependen meliputi Tingkat Implementasi IFRS (Y1), yang diukur dengan indeks komposit kelengkapan laporan keuangan, konsistensi kebijakan akuntansi, kualitas pengakuan dan pengukuran, serta kecukupan pengungkapan (skor 0–100), dan Daya Saing UMKM (Y2), diukur melalui pertumbuhan penjualan, akses pembiayaan formal, keterlibatan jaringan pemasaran internasional, dan kemampuan mempertahankan pelanggan korporat. Variabel independen meliputi Kompetensi SDM (X1), Persepsi Manfaat (X2), dan Dukungan Institusional (X3), masing-masing diukur dengan skala Likert 5 poin.

### Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data kuantitatif dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur yang divalidasi pada sampel pilot 50 UMKM, sedangkan data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur berdurasi 45–90 menit, direkam, ditranskripsikan verbatim, dan divalidasi melalui member checking.

Analisis data kuantitatif mencakup statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, serta analisis regresi berganda dan regresi sederhana menggunakan IBM SPSS Statistics versi 26 dan SmartPLS 4.0. Analisis data kualitatif menggunakan pendekatan analisis tematik enam tahap (Braun & Clarke, 2021) dibantu perangkat lunak NVivo 14, dengan integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif dilakukan melalui triangulasi pada tahap interpretasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Responden dan UMKM Sampel

Dari 450 kuesioner yang didistribusikan, sebanyak 412 kembali dan 387 dinyatakan valid untuk dianalisis, menghasilkan tingkat respons efektif 86 persen. Profil responden menunjukkan dominasi pemilik usaha langsung sebagai pengelola (68,5%), dengan kelompok usia 31–45 tahun terbesar (47,3%). Hanya 12,4 persen responden yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan, mengkonfirmasi bahwa sebagian besar pengelola UMKM tidak memiliki basis pendidikan formal akuntansi.

Distribusi UMKM berdasarkan sektor menunjukkan dominasi sektor perdagangan (41,9%), diikuti kuliner dan makanan olahan (23,5%), jasa (18,6%), dan manufaktur skala kecil (16,0%). Mayoritas responden (53,7%) telah beroperasi 3–10 tahun, dengan omset tahunan rata-rata Rp 200–500 juta.

### Tingkat Implementasi IFRS pada UMKM Makassar

Analisis terhadap indeks implementasi IFRS menunjukkan rata-rata skor 34,2 dari skala 100, termasuk kategori rendah. Sebanyak 58,4 persen UMKM sampel memiliki skor di bawah 30, 24,3 persen pada kisaran 30–60, dan hanya 17,3 persen yang mencapai skor di atas 60. Tidak ada satu pun UMKM dalam sampel yang mencapai skor di atas 85.

Artikel Penelitian

Economy Deposit Journal (E-DJ)
Volume 8 Nomor 2, September 2026
P-ISSN: 2685-080X, E-ISSN: 2685-0915
DOI: 10.36090

Komponen yang paling banyak dipenuhi adalah pencatatan transaksi pendapatan dan pengeluaran (68,2%), namun belum dapat dikategorikan sebagai implementasi SAK EMKM yang sesungguhnya karena tidak disertai pengakuan dan pengukuran sesuai standar. Komponen yang paling jarang dipenuhi adalah penyusunan laporan posisi keuangan lengkap (18,6%), penghitungan depresiasi aset tetap (21,4%), pemisahan aset bisnis dari aset pribadi (34,1%), dan penyusunan catatan atas laporan keuangan (8,3%).

Temuan yang paling menonjol adalah rendahnya pengetahuan tentang SAK EMKM dan SAK EP itu sendiri: 61,7 persen responden belum pernah mendengar istilah SAK EMKM, sementara 78,3 persen tidak familiar dengan SAK EP, mengkonfirmasi temuan Firdaus dan Wasilah (2020) dalam konteks yang lebih luas. Analisis lintas sektor mengungkap bahwa UMKM di sektor jasa profesional dan perdagangan ekspor menunjukkan tingkat implementasi lebih tinggi (rata-rata 47,3 dan 42,8) dibanding sektor kuliner (28,6) dan kerajinan (26,3).

**Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Faktor Determinan Implementasi IFRS**

| Variabel | β | t | Sig. |
|---|---|---|---|
| Kompetensi SDM (X1) | .341 | 8.217 | <.001 |
| Persepsi Manfaat (X2) | .287 | 6.943 | <.001 |
| Dukungan Institusional (X3) | .198 | 4.825 | <.001 |
| $R^2$ = 0,523 ; F = 47,832 ; p < 0,001 | | | |

Sumber: Data di Olah SPSS

**Faktor-Faktor Determinan Implementasi IFRS**

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan model regresi memiliki daya penjelas signifikan (F = 47,832, p < 0,001) dengan $R^2$ sebesar 0,523. Kompetensi sumber daya manusia (X1) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat implementasi IFRS (β = 0,341, t = 8,217, p < 0,001), sehingga H1 diterima. Hasil wawancara kualitatif memperjelas bahwa kompetensi SDM tidak hanya mencakup pengetahuan teknis akuntansi, tetapi juga kemampuan adaptif menggunakan alat bantu teknologi akuntansi.

Persepsi manfaat (X2) berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,287, t = 6,943, p < 0,001), sehingga H2 diterima. Informan kualitatif dengan skor implementasi tinggi secara konsisten menyatakan bahwa motivasi utama mereka bukanlah kepatuhan regulasi, melainkan pengalaman konkret tentang bagaimana laporan keuangan yang baik membuka akses kredit bank atau kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar.

Dukungan institusional (X3) berpengaruh positif dan signifikan (β = 0,198, t = 4,825, p < 0,001), sehingga H3 diterima, meski dengan kekuatan pengaruh lebih kecil. Temuan ini mengindikasikan bahwa dukungan institusional tidak dapat menggantikan kapasitas SDM yang memadai dan persepsi manfaat yang positif sebagai kondisi yang lebih fundamental.

**Hubungan Implementasi IFRS dengan Daya Saing UMKM**

Pengujian H4 menggunakan regresi sederhana menunjukkan tingkat implementasi IFRS berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM (β = 0,412, t = 9,563, p < 0,001, $R^2$ = 0,347), sehingga H4 diterima. Pengaruh implementasi IFRS paling kuat pada akses pembiayaan formal (β = 0,478) dan keterlibatan jaringan bisnis internasional (β = 0,391), sementara pengaruhnya terhadap pertumbuhan penjualan (β = 0,267) lebih moderat, mengindikasikan efek yang dimediasi melalui peningkatan akses sumber daya.

Informan dari kelompok UMKM dengan skor implementasi tinggi menceritakan pengalaman transformatif: seorang pelaku UMKM di sektor pengolahan makanan laut yang berhasil mengekspor ke Jepang menggambarkan bagaimana penyusunan laporan keuangan berbasis SAK EP menjadi syarat mutlak yang diminta importir sebelum bersedia menandatangani kontrak jangka panjang. Pengalaman serupa dikemukakan pelaku UMKM kerajinan yang berhasil mendapatkan pembiayaan bank BUMN setelah mampu menyajikan laporan keuangan dua tahun terakhir sesuai standar. Sebaliknya, UMKM dengan skor rendah cenderung terjebak dalam lingkaran setan keterbatasan

Artikel Penelitian

Economy Deposit Journal (E-DJ)
Volume 8 Nomor 2, September 2026
P-ISSN: 2685-080X, E-ISSN: 2685-0915
DOI: 10.36090

akses kredit yang membatasi ekspansi, sejalan dengan financial exclusion trap yang dideskripsikan Yoshino dan Taghizadeh-Hesary (2018).

**Hambatan Struktural: Perspektif Kualitatif**

Analisis tematik terhadap data wawancara menghasilkan empat tema utama hambatan struktural implementasi IFRS pada UMKM Makassar.

Tema 1: Kesenjangan Pengetahuan dan Keterampilan. Hambatan ini bukan semata-mata tentang tidak tahu caranya, tetapi lebih dalam, yaitu tidak tahu bahwa ada standar yang seharusnya diikuti dan bahwa standar tersebut berpotensi memberi manfaat nyata, menunjukkan kekosongan ekosistem sosialisasi yang serius.

Tema 2: Persepsi Biaya yang Tidak Proporsional. Pelaku UMKM dengan implementasi rendah cenderung memandang biaya implementasi standar akuntansi jauh melebihi manfaat yang diharapkan, persepsi yang seringkali tidak didasarkan pada kalkulasi rasional.

Tema 3: Fragmentasi Dukungan Institusional. Program pendampingan akuntansi dari pemerintah kota, asosiasi profesi, dan lembaga keuangan berjalan secara terpisah dan tidak terkoordinasi, sehingga dampaknya terfragmentasi.

Tema 4: Digital Divide sebagai Penghalang Teknologi. Kesenjangan digital masih menjadi hambatan nyata, terutama bagi pelaku usaha berusia di atas 50 tahun atau yang beroperasi di wilayah dengan konektivitas internet terbatas.

## KESIMPULAN

Tingkat implementasi IFRS (dalam konteks SAK EMKM dan SAK EP) pada UMKM di Kota Makassar masih berada pada level yang sangat rendah, dengan rata-rata indeks implementasi hanya 34,2 dari skala 100. Faktor-faktor determinan yang signifikan adalah kompetensi sumber daya manusia, persepsi manfaat, dan dukungan institusional, yang secara bersama-sama menjelaskan 52,3 persen variasi tingkat implementasi. Terdapat pula hubungan positif dan signifikan antara tingkat implementasi IFRS dengan daya saing UMKM Makassar dalam konteks persaingan global, terutama melalui akses pembiayaan formal dan keterlibatan jaringan bisnis internasional.

Temuan ini menegaskan bahwa investasi dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan merupakan strategi kompetitif yang memberikan return nyata bagi UMKM. Implikasi praktisnya adalah perlunya pendekatan pendampingan berbasis ekosistem yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, asosiasi profesi akuntansi, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi guna mempercepat adopsi IFRS pada UMKM sebagai strategi penguatan daya saing di Kawasan Timur Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelaku UMKM, konsultan akuntansi, dan pejabat Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Makassar yang telah berpartisipasi sebagai responden dan informan dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

Andriani, F., & Susanto, B. (2021). Determinan produksi informasi akuntansi pada usaha kecil di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 18(2), 112–130.

Braun, V., & Clarke, V. (2021). Thematic analysis: A practical guide. SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2023). Designing and conducting mixed methods research (4th ed.). SAGE Publications.

Artikel Penelitian

**Economy Deposit Journal (E-DJ)**
Volume 8 Nomor 2, September 2026
P-ISSN: 2685-080X, E-ISSN: 2685-0915
DOI: 10.36090

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kota Makassar. (2023). Data UMKM aktif Kota Makassar tahun 2023. Pemerintah Kota Makassar.

Firdaus, M., & Wasilah, A. (2020). Tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM di Pulau Jawa: Studi empiris. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 17(1), 45–67. https://doi.org/10.21002/jaki.2020.03

Florou, A., Kosi, U., & Pope, P. F. (2021). Mandatory IFRS adoption and the cost of debt capital: New evidence. Journal of Accounting and Public Policy, 40(4), 106–815.

Gereffi, G. (2020). What does the COVID-19 pandemic teach us about global value chains? The case of medical supplies. Journal of International Business Policy, 3(3), 287–301. https://doi.org/10.1057/s42214-020-00062-w

Hartanto, R., & Widiastuti, D. (2021). Difusi inovasi standar akuntansi pada usaha mikro kecil menengah: Sebuah tinjauan konseptual. Jurnal Ilmu Akuntansi, 14(1), 1–18.

Hidayat, T., & Lestari, P. (2022). Tekanan institusional dan adopsi standar akuntansi pada UMKM di negara berkembang. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 13(2), 245–262.

IASB (International Accounting Standards Board). (2022). IFRS for SMEs Standard 2022 (3rd ed.). IFRS Foundation.

IFRS Foundation. (2023). IFRS Accounting Standards — required and permitted jurisdictions 2023. https://www.ifrs.org/use-around-the-world/use-of-ifrs-standards-by-jurisdiction/

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2024). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2022). Perkembangan data usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) dan usaha besar (UB) tahun 2021–2022. Kemenkop UKM.

Musmini, L. S. (2021). Praktik akuntansi UMKM di Kawasan Indonesia Timur: Antara budaya, regulasi, dan kebutuhan bisnis. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga, 6(2), 976–996.

Nobes, C., & Parker, R. (2020). Comparative international accounting (13th ed.). Pearson.

Nurlaela, S., Masitoh, E., & Chomsatu, Y. (2021). Hambatan implementasi standar akuntansi bagi UMKM di Sulawesi Selatan: Kajian kualitatif. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 24(1), 1–18.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). Peraturan OJK Nomor 16 Tahun 2023 tentang layanan Securities Crowdfunding. OJK.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17.

Prasetyo, A., & Kusuma, H. (2022). SAK EP sebagai jembatan UMKM menuju standar internasional: Kajian konseptual dan prospek implementasi. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 22(2), 183–200.

Sari, R. N., & Purwanto, A. (2020). Hambatan adopsi standar akuntansi UMKM di Indonesia: Analisis faktor dan klasterisasi. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, 7(1), 15–32. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i1.14905

Trisna, I. G. A. M., & Iswajuni, I. (2023). Pengaruh kualitas laporan keuangan berbasis SAK EMKM terhadap akses pembiayaan formal UMKM di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 25(1), 35–50.

Wahyudi, I., & Pribadi, F. (2022). Digitalisasi dan literasi keuangan UMKM: Bagaimana platform digital mendorong adopsi pencatatan keuangan terstruktur. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 37(2), 110–128.

Yoshino, N., & Taghizadeh-Hesary, F. (2018). The role of SMEs in Asia and their difficulties in accessing finance. Asian Development Bank Institute Working Paper, No. 911. https://doi.org/10.22617/WPS190089-2